



LKjIP KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Selain itu, laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana

informasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan laporan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 yang berisi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.



Gunungtua, 27 Maret 2026
Bupati Padang Lawas Utara,

RESKI BASYAH HARAHAP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	2
1.2.1 Geografi dan Demografi Wilayah	2
1.2.2 Organisasi Perangkat Daerah	3
1.2.3 Personil/Pegawai	7
1.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara	9
1.3.1 Tata Kelola Pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab	9
1.3.2 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10
1.3.3 Pembangunan Ekonomi yang Maju	10
1.3.4 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	10
1.4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Instrumen untuk Mendukung Pengelola Kinerja	12
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	16
2.1.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Utara	18
2.2 Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Akuntabilitas Kinerja	32
3.1.1 Menbandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	35
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023	37
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang	



Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	40
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)	42
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan	44
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	50
3.2 Analisis Capaian Kinerja	54
3.3 Realisasi Anggaran	83
BAB IV PENUTUP	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah administrasi, komposisi dan jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ...	3
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Padang Lawas Utara	29
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	34
Tabel 3.1.1	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 3.1.2	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023.	37
Tabel 3.1.3	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	40
Tabel 3.1.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)	42
Tabel 3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan	44
Tabel 3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	50
Tabel 3.2.1	Peringkat Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam wilayah Sumatera Utara Tahun 2025	61
Tabel 3.2.2	Peringkat Capaian Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Dalam wilayah Sumatera Utara Tahun 2025	65
Tabel 3.2.3	Peringkat Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dalam Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025	69
Tabel 3.2.4	Peringkat Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Dalam wilayah Sumatera Utara Tahun 2025	72
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran	83



Tabel 4.1 Ikhtisar Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025	8
Gambar 1.2	Grafik Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	8
Gambar 2.1	Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara	13
Gambar 3.2.1	Grafik Nilai AKIP Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025	57
Gambar 3.2.2	Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025	61
Gambar 3.2.3	Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2025	62
Gambar 3.2.4	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025	65
Gambar 3.2.5	Grafik Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara Tahun 2025	66
Gambar 3.2.6	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025	68
Gambar 3.2.7	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Dalam Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025.....	70
Gambar 3.2.8	Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025	72
Gambar 3.2.9	Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten / Kota Se Sumatera Utara Tahun 2025	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah setiap tahun kepada publik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen laporan kinerja. Secara operasional, penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Penyelenggaraan kinerja juga memperhatikan pedoman evaluasi yang berfungsi memberi arah pengendalian atas perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Pedoman evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 selain memberi arahan dalam melaksanakan evaluasi kinerja bagi para evaluator, sekaligus memberi batasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk merumuskan proses kinerja agar lebih terkendali dan tepat sasaran serta memenuhi unsur kualitas.

Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen laporan kinerja menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah mekanisme perencanaan yang terarah,



menetapkan alat ukur kinerja yang tepat, evaluasi yang komprehensif, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

1.2.1 Geografi dan Demografi Wilayah

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Padang Lawas Utara terletak antara $1^{\circ}13'50''$ - $2^{\circ}2'32''$ Lintang Utara, serta $99^{\circ}20'44''$ - $100^{\circ}19'10''$ Bujur Timur dengan ketinggian wilayah 0-1915 m dpl. Kabupaten ini secara administratif terbagi atas 12 kecamatan, 386 Desa dan 2 Kelurahan dengan luas wilayah 3918,05 km².



Secara topografis wilayah Padang Lawas Utara didominasi oleh kemiringan lahan curam yaitu 174.719 Ha atau 44,59 persen dari luas daerah dan diikuti dengan topografi bergunung seluas 137.640 Ha atau 35,13 persen.

Topografi datar dan landai seluas 63.676 Ha atau 16,25 persen dari luas daerah serta topografi berbukit-bukit yaitu seluas 15.770 Ha atau 4,03 persen.





Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki wilayah administratifseluas 3918,05 km² yang meliputi 12 (dua belas) kecamatan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat sejumlah 275.448 jiwa, terdiri dari 140.375 jiwa laki-laki dan 135.073 jiwa perempuan yaitu:

Tabel 1.1
Luas wilayah administrasi, komposisi dan jumlah penduduk
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

No	Kecamatan	Penduduk	Luas Daratan (Km ²)
1	Batang Onang	14.499	295,82
2	Padang Bolak Julu	12.594	230,93
3	Portibi	30.654	191,98
4	Padang Bolak	61.247	616,46
5	Padang Bolak Tenggara	12.960	117,55
6	Simangambat	44.132	917,26
7	Ujung Batu	12.830	151,98
8	Halongonan	22.846	332,41
9	Halongonan Timur	25.869	291,46
10	Dolok	26.299	367,37
11	Dolok Sigompulon	16.582	360,11
12	Hulu Sihapas	5.147	72,24
TOTAL		285.659	3.945,557

Sumber : BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

1.2.2 Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki 41 Perangkat Daerah yang bertugas menjabarkan dan melaksanakan Visi, misi dan sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat 41 Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari



- a. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah tipe A, menyelenggarakan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif Perangkat Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten adalah tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyediaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi



- Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 9. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 15. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Sosial;
 16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tipe B, menyelenggarakan



- urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 18. Dinas Pertanian tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 19. Dinas Ketahanan Pangan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan;
 20. Dinas Lingkungan Hidup tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup;
 21. Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Perhubungan.
- e. Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, melaksanakan urusan pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana Daerah.



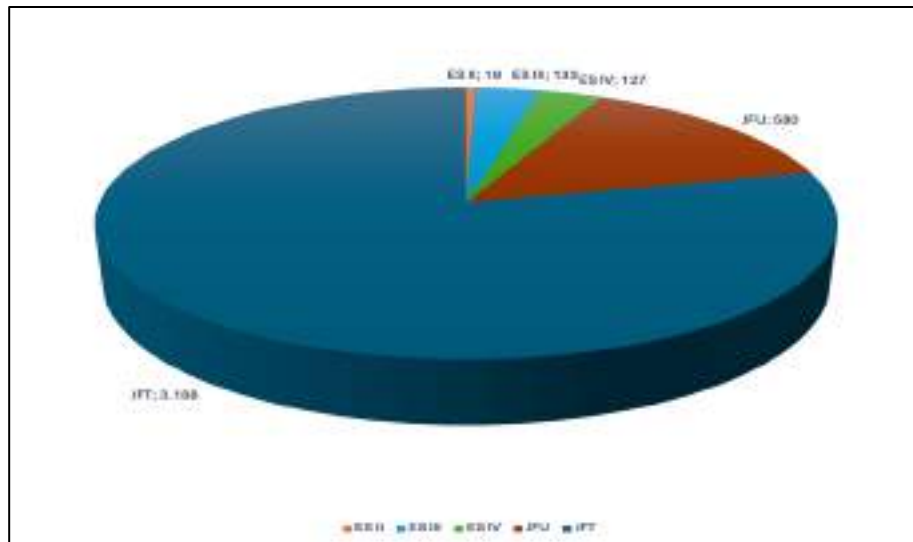
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Padang Bolak tipe A;
 2. Kecamatan Portibi tipe A;
 3. Kecamatan Halongonan tipe A;
 4. Kecamatan Simangambat tipe A;
 5. Kecamatan Padang Bolak Julu tipe A;
 6. Kecamatan Dolok tipe A;
 7. Kecamatan Dolok Sigompulon tipe A;
 8. Kecamatan Padang Bolak Tenggara tipe A;
 9. Kecamatan Batang Onang tipe A;
 10. Kecamatan Ujung Batu tipe A;
 11. Kecamatan Halongonan Timur tipe A;
 12. Kecamatan Hulu Sihapas tpe B.

1.2.3 Personil/Pegawai

Dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah serta untuk mencapai target berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2025 mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 4.047 orang, untuk PNS 3.261 orang dan untuk PPPK 786 orang pegawai. Salah satu instrumen penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah kuantitas dan kualitas pegawai yang memadai, sesuai dengan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta kompetensi. Berikut disajikan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan golongan.

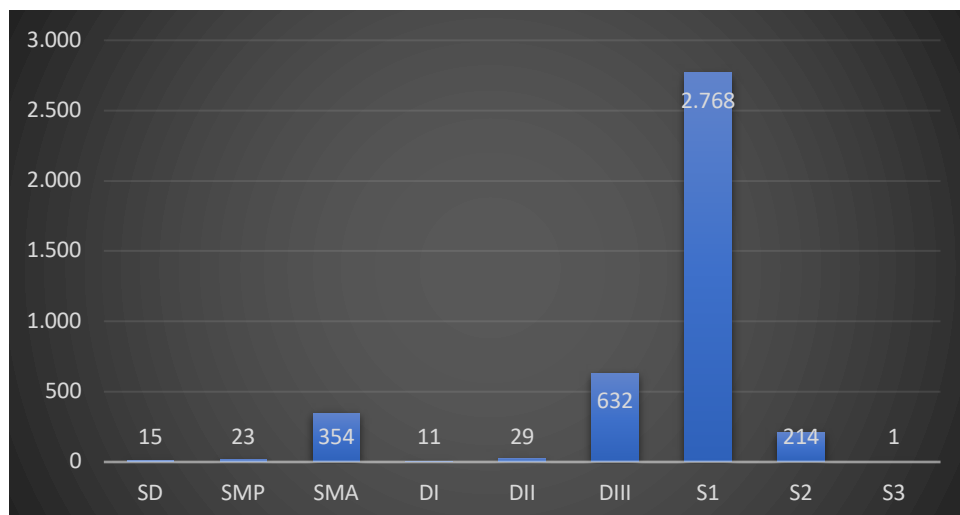


Gambar 1.1
Grafik Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Jenis
Jabatan Tahun 2025



Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025

Gambar 1.2
Grafik Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan
Pendidikan Tahun 2025



Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025



1.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka **isu strategis Kabupaten Padang Lawas Utara** adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tata Kelola Pemerintah yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab

Penilaian Kinerja pemerintah daerah dalam bidang birokrasi, dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Nilai Akip, Opini keuangan dan Indeks pelayanan publik. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang belum tercapai menjadi prioritas pembangunan yang selama 3 tahun kedepan. Pencapaian kinerja ini diupayakan dengan prinsip *Good Government* dalam pelayanan publik.



1.3.2 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk sebesar 285.659 Jiwa dengan jumlah kontribusi laki-laki sebesar 145.529 jiwa dan perempuan sebesar 140.130 Jiwa (BPS Padang Lawas Utara, 2026). Dilihat dari bidang Pendidikan pada tahun 2025 indikator Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,73, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,05 sedangkan bidang Kesehatan pada tahun 2025 indikator Angka Harapan Hidup sebesar 71,94, Prevalensi *Stunting* sebesar%. Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebesar 75,12. Hal ini mempunyai konsekuensi pada pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1.3.3 Pembangunan Ekonomi yang Maju

Dalam tiga tahun periode RPD Kabupaten Padang Lawas Utara, diharapkan sektor pertanian dan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Utara. Faktor penghambat yang paling mendasar dalam meningkatkan produktivitas sektor strategis ini adalah peningkatan hasil produksi bidang pertanian dan pengembangan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3.4 Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas menjadi sesuatu hal mutlak dalam mewujudkan Kota yang cerdas, maju dan beradab. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang berkualitas, kuantitas dan kualitas jaringan



irigasi sesuai standar, perumahan dan sanitasi layak serta penyediaan lingkungan hidup yang berkualitas. Sehingga terwujud kualitas hidup yang lebih baik melalui penyediaan infrastruktur dan lingkungan hidup yang bersih dan lestari.

1.4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN	BAB II PERENCANAAN KINERJA	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB IV PENUTUP	LAMPIRAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara 1.3 Isu-isu Strategis Kabupaten Padang Lawas Utara 1.4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	2.1 Instrumen untuk Mendukung Pengelola Kinerja 2.2 Perjanjian Kinerja	3.1 Akuntabilitas Kinerja 3.2 Analisis Capaian Kinerja 3.3 Realisasi Anggaran	Uraian Kesimpulan dari Seluruh Capaian Kinerja Selama Tahun 2023 dan Komitmen PEMDA dalam Meningkatkan Kinerja di Periode berikutnya	Dokumen Pendukung yang Membantu Batang Tubuh Laporan yang Ada



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Instrumen untuk Mendukung Pengelola Kinerja

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 3 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program Bupati, RPD, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta memperhatikan RPJP Nasional periode 2005 – 2025 dan selaras dengan Rencana Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara periode 2005 – 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya melakukan perbaikan manajemen pembangunan berbasis kinerja. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah:

1. Dalam menyusun RPD Tahun 2024-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan setempat. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan kesepakatan rancangan RPD, sehingga bisa dijadikan acuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan.



2. Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

Dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten mengembangkan aplikasi E-SAKIP PALUTA. Aplikasi ini menyajikan informasi terkait proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Untuk perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, dan monitoring serta evaluasi SAKIP tahun 2024 dapat diakses melalui <https://e-sakip.padanglawasutarakab.go.id>.

Gambar 2.1
Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Padang Lawas Utara





2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara

Visi pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari visi Penjabat Bupati. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 1 (Satu) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2024-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS AGRO INDUSTRI”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

MAJU

Kemajuan pembangunan secara ekonomis dalam 20 tahun ke depan, akan ditandai oleh produktivitas ekonomi yang tinggi, yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Peningkatan produksi dan pendapatan tersebut digerakkan oleh adanya akumulasi modal, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif, serta distribusi hasil pembangunan yang lebih merata, sehingga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan ke arah kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Kemajuan dalam bidang ekonomi juga harus dibarengi kemajuan di bidang sosial dan budaya yang tercermin dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan.



SEJAHTERA

Mengandung makna bahwa dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki sumber daya yang handal dan fondasi ekonomi yang kuat serta dapat memberikan kesempatan yang secara relatif seimbang pada semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.

AGRO INDUSTRI

Merupakan kegiatan yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah dalam menghasilkan produk untuk dipasarkan/digunakan/dikonsumsi, meningkatkan daya simpan, menambah pendapatan dan keuntungan produsen, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pemerataan pendapatan serta menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Optimalisasi nilai tambah dicapai dengan pola industri yang terintegrasi langsung dengan usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Mengingat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kawasan yang pada masa lalu terkenal dengan peternakan dan juga diharapkan akan tetap menjadi kawasan peternakan unggulan di masa yang akan datang, maka agro industri yang akan dikembangkan akan terkait dengan peternakan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.



Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan.
4. Mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien.
5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas padasetiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagipelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung misi tersebut. Tujuan merupakan panjabaran/implementasi dari pernyataan misi, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan yang lebih terukur, objektif dan terinci. Oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara ini juga sekaligus menggambarkan tugas dan fungsi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk 3 tahun kedepan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Dimana tahun 2025 merupakan tahun kedua tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau tahapan periode akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju.
4. Mewujudkan Keberkelanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima.
2. Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatnya Infrastruktur Dasar.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.



2.1.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Utara

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 16.A Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>TUJUAN 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.</p> <p>Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>SASARAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima</p>	<p>IKU 1 : Nilai AKIP</p>	<p>Parameter yang berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan proses akuntabilitas keuangan dan program dalam satu periode.</p>	<p>Nilai Sakip = Jumlah Bobot Perencanaan Kinerja (30) + Pengukuran Kinerja (25) + Pelaporan Kinerja (15) + Evaluasi Internal (10) + Capaian Kinerja (20).</p>	<p>OPD Utama Setdakab Bagian organisasi OPD Penunjang Badan PELITBANGDA Inspektorat</p>
			<p>IKU 2 : Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Parameter yang berfungsi mengukur kepatuhan atas layak saji laporan keuangan untuk satu periode tertentu berdasarkan Standar Akuntabilitas Pemerintahan.</p>	<p>Opini BPK atas laporan keuangan pada tahun - n</p>	<p>OPD Utama BadanPKPD OPD Penunjang Inspektorat Badan KPSPDM</p>



			IKU 3 : Indeks Pelayanan Publik	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Nilai Pelayanan Publik pada tahun - n = Jumlah Penilaian Kebijakan Pelayanan + Profesionalisme SDM + Sarana Prasarana + Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) + Konsultasi + Pengaduan, dan Inovasi Pelayanan) dari Organisasi Perangkat Daerah.	OPD Utama Setdakab Bagian Organisasi OPD Penunjang Dinas Kominfo Dinas Dukcapil Dinas PMPTSP
2	TUJUAN 2 : Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas Indikator : Indeks Pembangunan Manusia	SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing	IKU 4 : Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Angka Harapan lama sekolah pada tahun - n	OPD Utama Dinas Pendidikan OPD Penunjang Dinas PUTR
			IKU 5 : Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-Rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	Rata - rata lama sekolah pada tahun - n	OPD Utama Dinas Pendidikan



			<p>IKU 6 : Angka Harapan Hidup</p>	<p>Alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam membantu mewujudkan lama harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara.</p>	<p>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas</p>	<p>OPD Utama Dinas Kesehatan OPDPenunjang DinasP3AP2KB Dinas Ketapang Dinas PUTR</p>
			<p>IKU 7 : Prevalensi Stunting</p>	<p>Presentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya.</p>	<p>Jumlah balita dengan (tinggi badan/umur) di bawah -3 SD ----- x 100 Jumlah balita yang diukur</p>	<p>OPD Utama DinasP3AP2KB</p>
3	<p>Tujuan 3 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju</p>	<p>SASARAN 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat</p>	<p>IKU 8 : Jumlah Kunjungan Wisatawan</p>	<p>Rumus dasar yang dapat digunakan untuk mengkalkulasi jumlah kunjungan wisatawan yakni dengan menghitung persentase rata-rata okupansi hotel dikalikan jumlah tempat tidur (hotel Bintang/Non Bintang) dibagi Length of Stay (LOS).</p>	<p>Jumlah Kunjungan wisatawan pada tahun n</p>	<p>OPD Utama Dinas Pariwisata</p>



	Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi		IKU 9 : Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Alat ukur untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode.	Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah	OPD Utama Dinas Pertanian, Dinas Ketapang, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan
4	Tujuan 4 : Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	SASARAN 4 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar	IKU 10 : Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantab	Jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.	Angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap kabupaten/kota dengan panjang jalan kabupaten/kota secara keseluruhan dalam satu persen.	OPD Utama Dinas PUTR



<p>Indikator : Laju Pertumbuhan Ekonomi</p>		<p>IKU 11 : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak</p>	<p>Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.</p>	<p>Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan ----- x100% Jumlah penduduk seluruhnya</p>	<p>OPD Utama Dinas PUTR</p>
	<p>SASARAN 5 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar</p>	<p>IKU 12 : Indeks Kualitas Air</p>	<p>Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p>	<p> $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{baku-ruah}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{maksimum}}}{2}}$ 0 ≤ PI ≤ 1,0 → baik (memenuhi baku mutu) 1,0 < PI ≤ 5,0 → cemar ringan 5,0 < PI ≤ 10,0 → cemar sedang PI > 10,0 → cemar berat </p>	<p>OPD Utama Dinas Lingkungan Hidup</p>



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2024	Target 2025	2026	Kondisi Akhir
Misi 2 : Mengembangkan Prasarana dan Sarana Pembangunan								
Misi 5 : Menciptakan taat asas dan tertib hukum								
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi						
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima	Nilai AKIP	Angka (Predikat)	CC	B	BB	BB	BB
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pelayanan Publik	Nilai (Kategori)	B-	B	B	A-	A-



Misi 1 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia								
Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Persen	69,85	71,46	72,06	72,06	72,06
	Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing	Angka Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	13,23	13,43	13,60	13,85	13,85
		Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,46	9,56	9,62	9,78	9,78
		Angka Harapan Hidup	Angka	67,53	67,78	67,88	68,04	68,04
		Prevelensi Stunting	Persen	29,2	19	17	14	14



Misi 2 : Mengembangkan ekonomi ke arah industri								
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,14		1,73	1,76	1,76
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	23,456	25,450	30,540	35,345	35,345
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan	Persen	39,99	40,02	40,07	40,11	40,11
Misi 4 : Mendorong Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Efisien								
Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan		Indek Kualitas Lingkungan Hidup						
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	Persen	71,595	72	74	75	75



		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	Persen	83,52	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Persen	70	71	72	73	73



2.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Kabupaten Padang Lawas Utara secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2025 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang di dokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*).

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara umum tujuan perjanjian kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 16.A Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, hal ini sebagai indikator keberhasilan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kabupaten Padang Lawas Utara

Prioritas Pembangunan	Tujuan Pembangunan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target				
1	Meningkatkan Manajemen Pelayanan Umum Pemerintah yang Prima	1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan yang prima	1	Nilai AKIP	BB
						2	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
						3	Indeks Pelayanan Publik	B



2	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	2	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	2	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	4	Angka Harapan Lama Sekolah	13,60
						5	Rata-Rata Lama Sekolah	9,62
						6	Angka Harapan Hidup	67,88
						7	Prevalansi Stunting	17
3	Mengembangkan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pariwisata dan Teknologi Tepat Guna	3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju	3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	8	Jumlah Kunjungan Wisatawan	30,540
						9	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	40,07



4	Meningkatkan Infrastruktur untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kemandirian daerah	4	Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	10	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	74
						11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	100
				5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	12	Indeks Kualitas Air	72



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai cara untuk memberikan informasi dan mengungkapkan aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas sebagai alat pertanggungjawaban memiliki makna evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dalam birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.



Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis daerah yang tertuang dalam RPD sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai alat ukur yang objektif. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pada Tahun 2025, dalam proses perjalanan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, selain mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara juga mencermati dan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam memastikan terpenuhinya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja agar didukung proses pemenuhan, kualitas dan daya implementasinya. Dalam proses pengukuran kinerja, sebagaimana diatur dalam tata cara evaluasi kualitas pengukuran kinerja sesuai Permenpan 88 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sepenuhnya telah menetapkan skala pengukuran capaian kinerja untuk memudahkan proses penilaian capaian pada tahun 2025 dibawah ini dituangkan tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	> 90 – 100	Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Sangat Baik
3	BB	> 70 – 80	Baik
4	B	>60 – 70	Cukup Baik
5	CC	>50 – 60	Agak Kurang
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Padang Lawas Utara merupakan kinerja tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar..... yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:



3.1.1 Menbandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1
Menbandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	62 (B)	62.18 (B)	100,2 %	E-SAKIP Reviu Kemenpan RB
		Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	Belum Keluar	Belum Keluar	BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
		Indeks Pelayanan Publik	4,20 (A-)	3,64 (B)	86,6 %	Kemenpan RB Nomor 659 Tahun 2024
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Angka harapan lama sekolah	13,60	13,73	100,9%	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Rata-Rata lama sekolah	9,62	10,05	104%	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Angka harapan hidup	67,88	71,94	105,9 %	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Prevalansi Stunting	17	Belum Keluar	Belum keluar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	30.540	27.613	90,4 %	Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	40,07	44.72	111,6 %	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	74	54,96	76,9 %	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	100	83,79	83,7 %	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	72	70	97,2 %	Dinas Lingkungan Hidup



3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

Tabel 3.1.2
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	CC	60,71 (B)	62 (B)	62.18 (B)	100,2 %
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan	B-	4,11 (A-)	4,20 (A-)	3,64 (B)	86,6 %
2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	Belum Keluar	Belum Keluar
3	Meningkatnya derajat pendidikan	Angka harapan lama sekolah	13,53	13,54	13,60	13,73	100,9%



		Rata-Rata lama sekolah	9,55	9,82	9,62	10,05	104%
4	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	71,57	71,74	67,88	71,94	105,9 %
	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Prevalansi Stunting	21,80	30	17	Belum Keluar	Belum keluar
5	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,10	NA	Na	NA	NA
6	Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73,41	73,01	NA	76,19	NA
7	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	• Indeks Gini	• 0,241	• NA	• NA	• NA	• NA
		• Tingkat kemiskinan	• 8,97	• NA	• NA	• NA	• NA
8	Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	39.638	34.965	30.540	27.613	90,4 %
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	41,07	42,98	40,07	44,72	111,6 %
9	Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan Pembangunan daerah	Tingkat pertumbuhan Investasi	137	NA	NA	NA	NA



10	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah	52,10	NA	NA	NA	NA
11	Meningkatnya kepatuhan dalam pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDT	Persentase kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR	67,72	NA	NA	NA	NA
	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	52,10	53,5	74	54,96	76,9 %
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	83,52	83,79	100	83,79	83,7 %
12	Meningkatnya Pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,87	NA	NA	NA	NA
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	72,87	74		70	97,2 %



3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.1.3
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	62,18 (B)	75 (BB)	80,9
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Belum Keluar	WTP	Belum Keluar
		Indeks Pelayanan Publik	3,64 (b)	4,01 (A-)	102,4
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Angka harapan lama sekolah	13,73	13,85	97,7
		Rata-Rata lama sekolah	10,05	9,78	100,4
		Angka harapan hidup	71,94	68,04	105,4
		Prevalansi Stunting	Belum Keluar	14	Belum Keluar



3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	27.613	35.245	99,2
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	44,72	40,11	107,4
4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	54,96	75	71,3
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	83,79	100	83,79
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	70	73	98,6



3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

Tabel 3.1.4
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika ada)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahunan	Standar Nasional/Provinsi	% Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	62,18 (B)		
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Belum Keluar		
		Indeks Pelayanan Publik	3,64 (B)		
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Angka harapan lama sekolah	13,73	13,49	
		Rata-Rata lama sekolah	10,05	9,93	
		Angka harapan hidup	71,94	70,28	
		Prevalansi Stunting	Belum Keluar		
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	27.613		
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	44,72		



4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	54,96		
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	83,79		
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	70		



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel 3.1.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	62 (B)	62,18 (B)	100,2	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak hal yang perlu diperhatikan pada Kompen penilaian SAKIP 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan Pt. Ide Bangsa Mahardika (SMART ID) pada kegiatan penjenjangan kinerja Perangkat daerah
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	Belum Keluar	Belum Keluar	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilaksanakan secara optimal dan menunggu hasil keluar dari BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara 	<ul style="list-style-type: none">



		Indeks Pelayanan Publik	4,20 (A-)	3,64 (B)	86,6	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat komitmen kepala daerah dengan pimpinan perangkat daerah dalam pencapaian pelayanan publik Meningkatnya peran aktif perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat standart Pelayanan organisasi perangkat daerah Melakukan evaluasi Pelayanan perangkat daerah Melaksanakan punishment dan rewad kepada organisasi perangkat daerah yang memiliki nilai pelayan rendah
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Angka harapan lama sekolah	13,60	13,73	100,9	•	•
		Rata-Rata lama sekolah	9,62	10,05	104	•	•
		Angka harapan hidup	67,88	71,94	105,9	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat fasilitas kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan program – program penunjang kesehatan



		Prevalansi Stunting	17	Belum Keluar	Belum keluar	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilaksanakan secara optimal dan menunggu hasil keluar dari Survei Kesehatan Indonesia oleh Kementerian Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none">
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	30.540	27.613	90,4	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan program kegiatan kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan informasi publik pada media sosial terkait pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Padang Lawas Utara
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	40,07	44,72	111,6	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana peningkatan Kontribusi sektor PDRB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan reward dan punishment terhadap kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan
4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	74	54,96	76,9	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">



		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	100	83,79	83,7	•	•
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	72	70	97,2	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan program kegiatan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisai lingkungan hidup • Memberikan punisment terhadap pencemaran lingkungan



3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(RP.)		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	62 (B)	62.18 (B)	100,2	20.769.628.643	19.776.775.117	95.21	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	Belum Keluar	Belum Keluar	384.418.186.542	373.785.397..531	97.23	
		Indeks Pelayanan Publik	4,20 (A-)	3,64 (B)	86,6	594.834.100	556.070.100	93.48	
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Angka harapan lama sekolah	13,60	13,73	100,9	89.596.481.642	87.201.593.137	97.32	
		Rata-Rata lama sekolah	9,62	10,05	104	89.596.481.642	87.201.593.137	97.32	
		Angka harapan	67,88	71,94	105,9	68.249.789.531	57.504.535.860	84.26	



		hidup							
		Prevalansi Stunting	17	Belum Keluar	Belum keluar	2.903.400.000	2.884.220.000	99.33	
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	30.540	27.613	90,4	964.581.200	905.269.748	93.85	
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	40,07	44.72	111,6	5.025.531.200	2.483.089.210	49.40	
4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	74	54,96	76,9	49.126.333.493	48.459.852.079	98.64	
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	100	83,79	83,7	16.394.717.870	14.888.740.500	90.81	
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup kebutuhan infrastruktur dasar	Indeks Kualitas	72	70	97,2	2.931.439.500	2.917.391.225	99.52	



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	100,2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100		
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100		
				Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian Dan Pengembangan Yang Dilaksanakan	100		
		Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Belum Keluar	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Fungsi Pengawasan	100		
				Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	100		



				Program pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	100		
				Program pengelolaan Pendapatan Daerah	indek Reformasi Birokrasi	100		
		Indeks Pelayanan Publik	86,6	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur TIK Dan Pengembangan Aplikasi	100		
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan	100		
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	100		
				Program pelayanan penanaman modal	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten	100		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100		
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Angka harapan lama sekolah	100,9	Program pengelolaan pendidikan	Peningkatan Pengelolaan Pendidikan	99,98		
		Rata-Rata lama sekolah	104					



		Angka harapan hidup	105,9	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100		
		Prevalansi Stunting	Belum Keluar	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	100		
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	90,4	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100		
				Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Infrastruktur pariwisata	0		
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	100		
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	111,6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Nilai Produksi Peternakan Yang Di Ekspor Ke Luar Wilayah	100		
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan prasarana pertanian	100		
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Penanggulangan Penyakit Ternak	100		



				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SKOR PPH	100		
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	0		
4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	76,9	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jalan yang Dapat dilalui Roda 4	77.93		
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses AIR Minum Layak	83,7	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air	100		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	97,2	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	KLH	100		



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat diketahui :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 5 target
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target
3. Target dengan capaian dibawah 100% sebanyak 5 target
4. Target yang tidak dapat diperoleh pengukurannya sebanyak 2 target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, berdasarkan pengukuran kinerja dan IKU sebagai acuan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 untuk mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara Yang Maju dan Sejahtera Berbasis Agro Industri. secara umum Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 5 sasaran dan 12 indikator kinerja daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima

Capaian Indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima” adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai AKIP	62 (B)	62.18 (B)	100,2
2	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	Belum Keluar	Belum Keluar
3	Indeks Pelayanan Publik	4,20 (A-)	3,64 (B)	86,6

a. Nilai AKIP

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2025 belum memenuhi dari target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi perlu adanya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan peningkatan Nilai AKIP. Dalam mencapai target Indikator Nilai AKIP, Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Nilai AKIP diantaranya:

1. Membentuk TIM Strategis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025
2. Penguatan Aplikasi E-SAKIP
3. Meningkatkan Kualitas Verifikasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. Melaksanakan Sosialisai Regulasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5. Meningkatkan peran Inspektorat selaku Tim Evaluator SAKIP
6. Membentuk TIM Pendampingan Penyusunan Dokumen Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025-2029
7. Melaksanakan kerjasama dengan PT. Ide Bangsa Mahardika (SMART-ID) dalam Penyusunan Penjenjangan Kinerja 30 Perangkat Daerah
8. Meningkatkan kualitas SDM Perencana Perangkat Daerah dalam penyusunan Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, Penyusunan Rencana Aksi dan Rencana Kerja dll.
9. Meningkatkan Pemahaman Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Akan Penerapan Sakip
10. Memperbaiki Dan Mereviu Pohon Kinerja Dan Cascading Kabupaten Dan Perangkat Daerah
11. Mengawal Penginputan Dokumen SAKIP
12. Melakukan Monitoring Penerapan SAKIP Perangkat Daerah

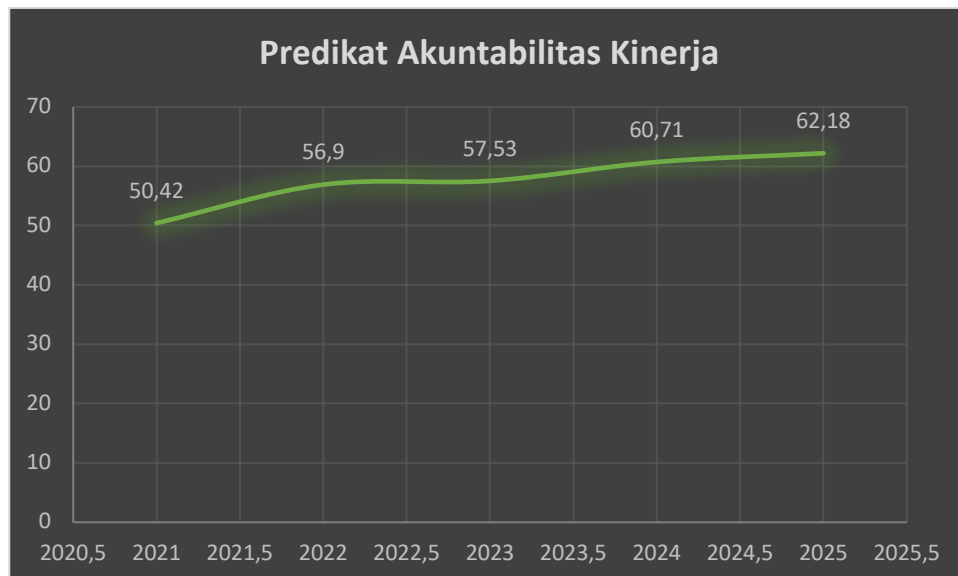
Upaya yang akan dilakukan :

1. Melaksanakan Penyusunan RMJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025-2030
2. Penguatan SDM Perencana dalam penyusunan Dokumen LkJIP Perangkat Daerah
3. Pemberian Reward dan Punishment terhadap Nilai AKIP tertinggi dan terendah di Perangkat Daerah



Berikut ini disajikan capaian kinerja pada Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dan periode sampai dengan Tahun kelima (2021-2025) sebagai berikut :

Gambar 3.2.1
Grafik Nilai AKIP
Kabupaten Padang Lawas Utara 2021-2025



b. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan belum ditetapkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara maka belum dapat dikemukakan tingkat capaiannya. Namun diharapkan capaian tahun 2025 akan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam mencapai target indikator Opini laporan keuangan pemerintah daerah, Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan pengawasan
2. Program pengelolaan keuangan daerah



3. Program pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program pengelolaan Pendapatan Daerah

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Opini laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya:

1. Meningkatkan Reviu Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Tindak Lanjut temuan BPK, Inspektorat Provinsi, Aparat Penegak Hukum, dan Pengaduan Masyarakat
5. Menghimbau Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Tepat waktu
6. Sosialisai Pedoman pelaksanaan APDB sebagai acuan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan
7. Penyusunan APBD dengan tepat waktu
8. Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
9. Sosialisasi Anti Korupsi dan SABER (Sapu Bersih) Pungli.

Upaya yang akan dilakukan :

1. Memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan dan Standar
3. Menyiapkan data dan dokumen yang lengkap dan akurat
4. Melakukan rekonsiliasi secara rutin
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Membuat MOU (perjanjian kerjasama antara APIP dan APH) dalam hal tindak lanjut temuan BPK, Inspektorat Provinsi, Aparat Penegak Hukum, dan Pengaduan Masyarakat
7. Peningkatan Sumber Daya Aparatur APIP



8. Merpertajam Reviu Dokumen Keuangan Perangkat Daerah
9. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Meningkatkan Koordinasi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Sumatera Utara terkait Audit Keuangan, Audit Kinerja, dan Audit Ketaatan terhadap Peraturan yang berlaku terhadap Perangkat Daerah
11. Meningkatkan Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah

c. Indeks Pelayanan Publik

Dari tabel diatas dapat di uraikan pencapain target indikator sudah terealisasi. Untuk memenuhi target Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program pelayanan penanaman modal
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Indeks Pelayanan Publik diantaranya:

1. Tersedianya Leafleat dan Media Sosial dalam mempermudah Masyarakat mengetahui informasi Pelayanan Publik
2. Tersedianya Aplikasi Sistem Pelayanan Secara Online Berbasis Android untuk mempermudah Masyarakat dalam Pelayanan Kependudukan
3. Melakukan Jemput bola dalam melayani Masyarakat dalam pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Perizinan
4. Tersedianya Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik di setiap Perangkat Daerah dalam bentuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).



5. Melakukan pendampingan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan OMBUDSMAN RI Perwakilan Sumatera Utara untuk memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Nasional dan berada pada Opini Kualitas Tinggi (79,50).
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik di setiap Unit Pelayanan Publik (UPP).
7. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

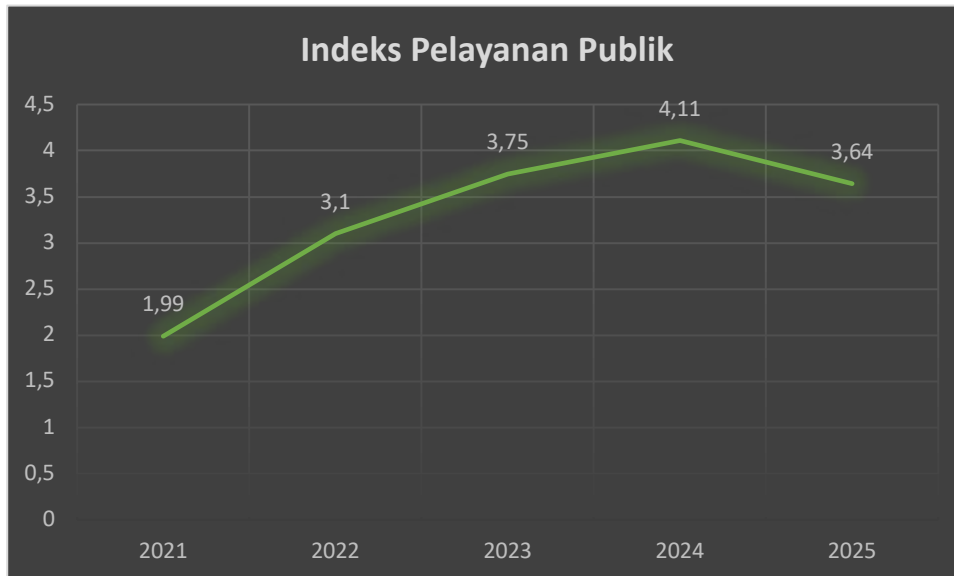
Upaya yang akan dilakukan :

1. Meningkatkan Penggunaan Media sosial dalam pelayanan Publik.
2. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per Semester yang lebih akurat untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital dan mewujudkan reformasi birokrasi berdampak
4. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling dalam memaksimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
5. Meningkatkan Pelayanan Publik terutama yang menjadi Lokus Penilaian Nasional Kemenpan-RB (target 4.20) dan Ombudsman RI (Target Zona Hijau 89.00)

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dan periode sampai dengan Tahun keempat (2021-2025) sebagai berikut :



Gambar 3.2.2
Grafik Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025



Tabel 3.2.1
Peringkat Capaian Indeks Pelayanan Publik
Dalam Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025

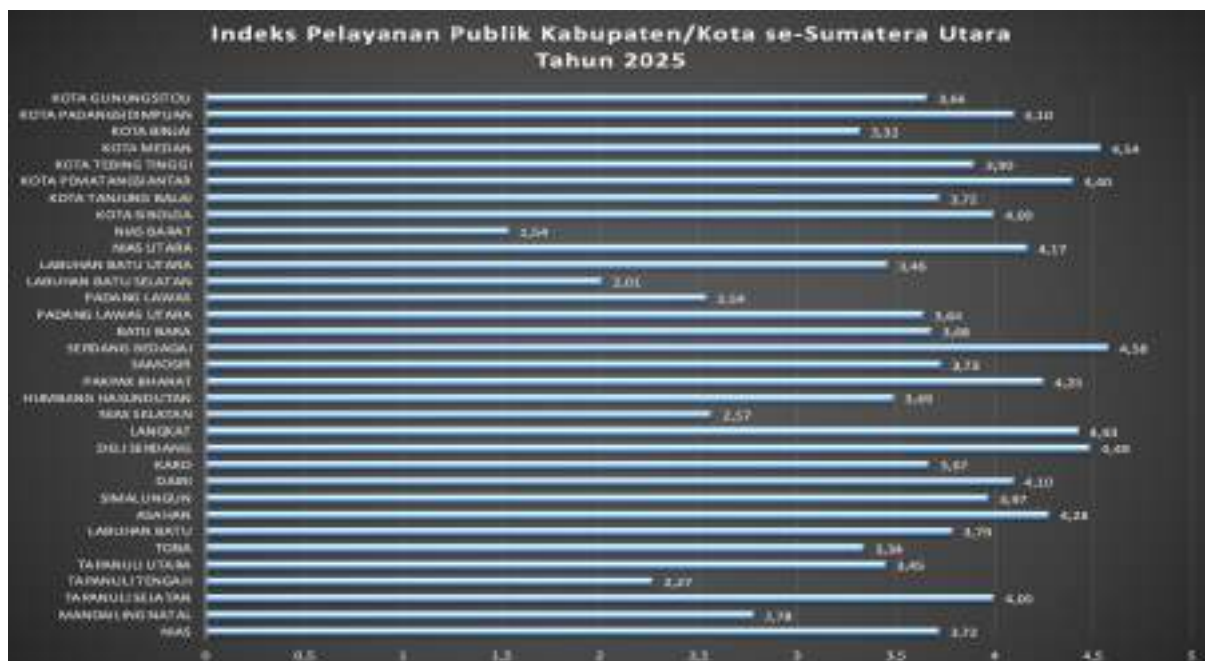
No	Kabupaten Kota	Capain 2024	BOBOT
1	Nias	3,72	B
2	Mandailing Natal	2,78	C
3	Tapanuli Selatan	4,00	B
4	Tapanuli Tengah	2,27	C-
5	Tapanuli Utara	3,45	B-
6	Toba	3,34	B-
7	Labuhan Batu	3,79	B
8	Asahan	4,28	A-
9	Simalungun	3,97	B
10	Dairi	4,10	A-
11	Karo	3,67	B
12	Deli Serdang	4,49	A-
13	Langkat	4,43	A-
14	Nias Selatan	2,57	C
15	Humbang Hasundutan	3,49	B-



16	Pakpak Bharat	4,25	A-
17	Samosir	3,73	B
18	Serdang Bedagai	4,58	A
19	Batu Bara	3,68	B
20	Padang Lawas Utara	3,64	B
21	Padang Lawas	2,54	C
22	Labuhanbatu Selatan	2,01	C-
23	Labuanbatu Utara	3,46	B-
24	Nias Utara	4,17	A-
25	Nias Barat	1,54	D
26	Sibolga	4,00	B
27	Tanjungbalai	3,72	B
28	Pematangsiantar	4,40	A-
29	Tebing Tinggi	3,90	B
30	Medan	4,54	A
31	Binjai	3,32	B-
32	Padangsidempuan	4,10	A-
33	Gunungsitoli	3,66	B

Sumber data : Kementerian PANRB

Gambar 3.2.3
Grafik Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara Tahun 2025





Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing

Capaian Indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing” adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,60	13,73	100,9
2	Rata-Rata lama sekolah	9,62	10,05	104
3	Angka harapan hidup	67,88	71,94	105,9
4	Prevalansi Stunting	17	Belum Keluar	Belum keluar

d. Angka harapan Lama Sekolah

Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah hal ini di dapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana data yang digunakan data tahun 2025, Angka Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Untuk memenuhi target Indikator Angka Harapan lama sekolah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program pengelola pendidikan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Rata-Rata lama sekolah diantaranya:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah (Pembangunan ruang guru, UKS, utilitas sekolah, laboratorium SD, dan TIK)



2. Meningkatkan perlengkapan dan peralatan penunjang kegiatan belajar dan mengajar
3. Rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas sekolah
4. Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama
5. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
6. Pengelolaan Dana BOP PAUD
7. Pemberian Bantuan Beasiswa Tingkat SD dan SMP dan pemberian bantuan beasiswa untuk mahasiswa Berprestasi yang Kurang Mampu
8. Membangun akses transportasi menuju lokasi Pendidikan

Upaya yang akan dilakukan :

1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan berupa pemenuhan standar sarana prasarana
2. Melaksanakan rehabilitasi prasarana pendidikan
3. Melaksanakan bantuan keuangan kepada siswa miskin berprestasi dan pengusulan lebih banyak siswa miskin penerima beasiswa
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkuat tenaga Pendidikan
5. Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama untuk anak perempuan yang seringkali mendapatkan pendidikan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki.

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada Angka harapan Lama Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dan periode sampai dengan Tahun keempat (2021-2025) sebagai berikut :



Gambar 3.2.4
Grafik Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025



Tabel 3.2.2
Peringkat Capaian Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah
Dalam Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025

No	Kabupaten Kota	Capaian 2025
1	Nias	13,32
2	Mandailing Natal	14,1
3	Tapanuli Selatan	13,9
4	Tapanuli Tengah	13,51
5	Tapanuli Utara	13,75
6	Toba	13,82
7	Labuhan Batu	13,3
8	Asahan	12,84
9	Simalungun	13,16
10	Dairi	13,54
11	Karo	13,27
12	Deli Serdang	13,46
13	Langkat	13,29
14	Nias Selatan	13,12
15	Humbang Hasundutan	13,47
16	Pakpak Bharat	13,92



17	Samosir	13,53
18	Serdang Bedagai	12,66
19	Batu Bara	13,13
20	Padang Lawas Utara	13,73
21	Padang Lawas	14,11
22	Labuhanbatu Selatan	13,54
23	Labuanbatu Utara	13,59
24	Nias Utara	13,38
25	Nias Barat	13,17
26	Sibolga	13,44
27	Tanjungbalai	13,16
28	Pematangsiantar	14,62
29	Tebing Tinggi	13,14
30	Medan	14,8
31	Binjai	14,19
32	Padangsidempuan	14,72
33	Gunungsitoli	13,95

Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3.2.5
Grafik Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara Tahun 2025





e. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah hal ini di dapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana data yang digunakan data tahun 2025, Rata-Rata Lama Sekolah merupakan salah satu komponen pembentuk IPM dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Untuk memenuhi target Indikator Rata-Rata lama sekolah dan Angka Harapan lama sekolah Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 20245 sebagai berikut:

1. Program pengelolaan pendidikan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Rata-rata Lama Sekolah diantaranya:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah (Pembangunan ruang guru, UKS, utilitas sekolah, laboratorium SD, dan TIK)
2. Meningkatkan perlengkapan dan peralatan penunjang kegiatan belajar dan mengajar
3. Rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas sekolah
4. Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama
5. Pengadaan alat pratik dan peraga siswa PAUD
6. Pengelolaan Dana BOP PAUD
7. Pemberian Bantuan Beasiswa Tingkat SD dan SMP dan pemberian bantuan beasiswa untuk mahasiswa Berprestasi yang Kurang Mampu
8. Membangun akses transportasi menuju lokasi Pendidikan

Upaya yang akan dilakukan :

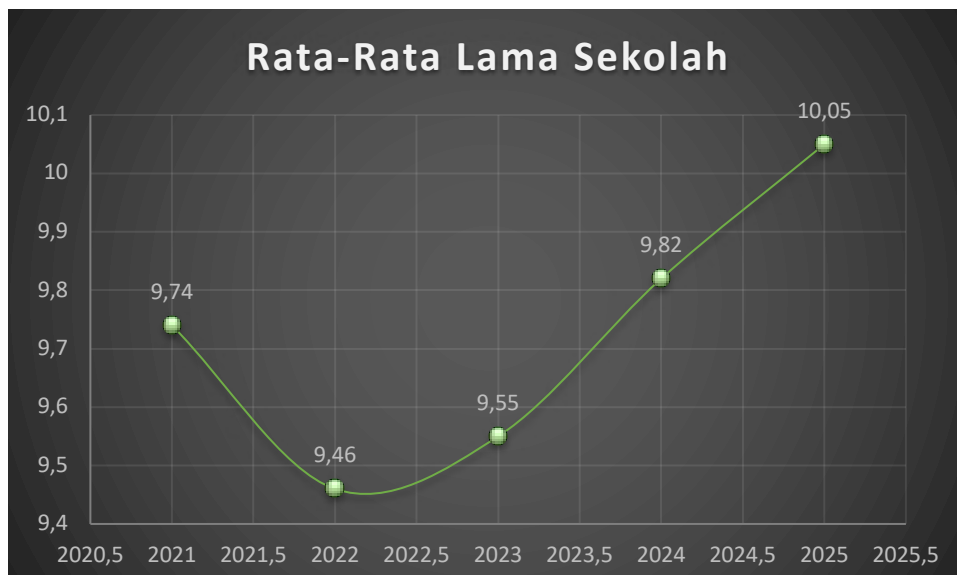
1. Membangun lebih banyak sekolah di daerah yang sulit dijangkau untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan
2. Memperbaiki dan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas,



- buku pelajaran, teknologi informasi, dan alat bantu belajar lainnya untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik
3. Menjamin pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dengan memberikan akses pendidikan secara gratis kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin
 4. Menyediakan pelatihan yang terus-menerus untuk guru agar mereka dapat mengajar dengan lebih baik dan lebih efektif
 5. Memperbarui kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta fokus pada keterampilan
 6. Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan, terutama di daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah

Berikut ini disajikan capaian kinerja pada Rata-rata Lama Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dan periode sampai dengan Tahun keempat (2021-2025) sebagai berikut :

Gambar 3.2.6
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025





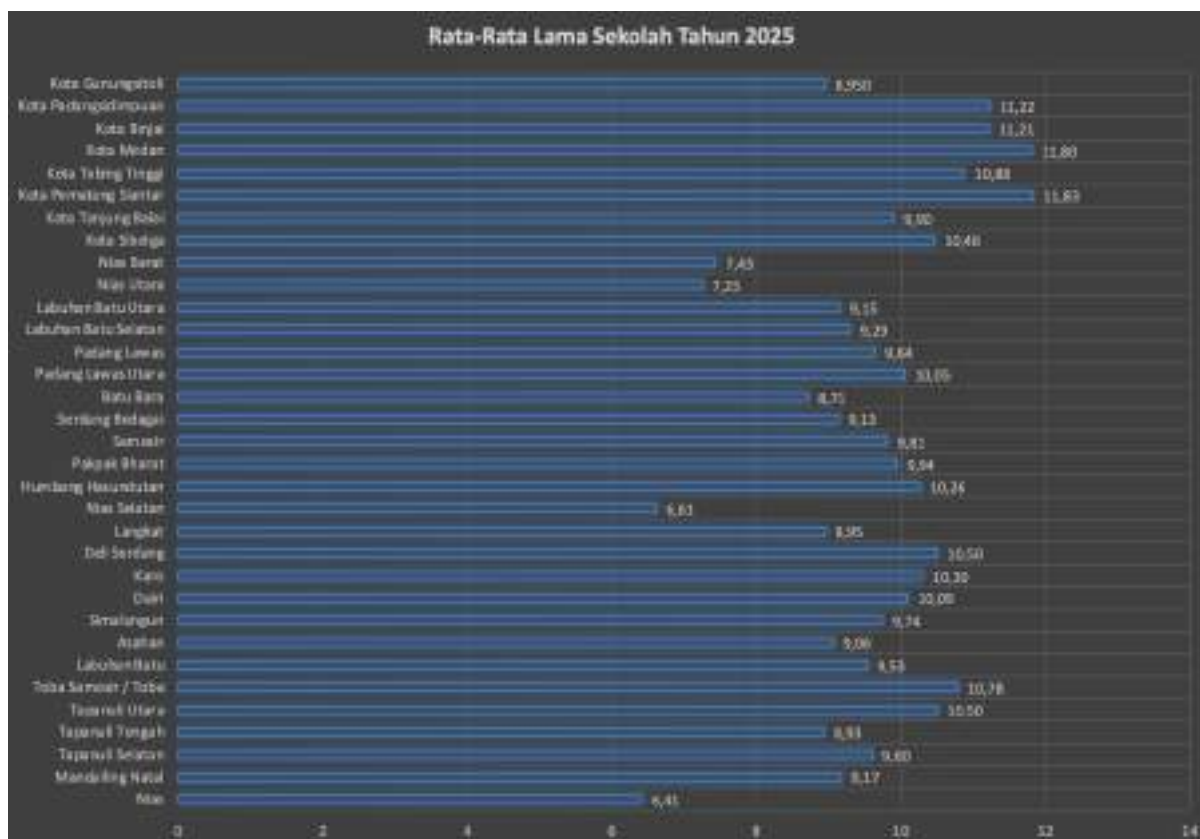
Tabel 3.2.3
Peringkat Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah
Dalam Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025

No	Kabupaten Kota	Capaian 2025
1	Nias	6,41
2	Mandailing Natal	9,17
3	Tapanuli Selatan	9,60
4	Tapanuli Tengah	8,93
5	Tapanuli Utara	10,50
6	Toba	10,78
7	Labuhan Batu	9,53
8	Asahan	9,06
9	Simalungun	9,74
10	Dairi	10,09
11	Karo	10,30
12	Deli Serdang	10,50
13	Langkat	8,95
14	Nias Selatan	6,61
15	Humbang Hasundutan	10,26
16	Pakpak Bharat	9,94
17	Samosir	9,81
18	Serdang Bedagai	9,13
19	Batu Bara	8,71
20	Padang Lawas Utara	10,05
21	Padang Lawas	9,64
22	Labuhanbatu Selatan	9,29
23	Labuanbatu Utara	9,15
24	Nias Utara	7,25
25	Nias Barat	7,43
26	Sibolga	10,46
27	Tanjungbalai	9,90
28	Pematangsiantar	11,83
29	Tebing Tinggi	10,88
30	Medan	11,80
31	Binjai	11,21
32	Padangsidempuan	11,22
33	Gunungsitoli	8,950

Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 3.2.7
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara Tahun 2025



f. Angka Harapan Hidup

Indikator Kinerja Angka harapan Hidup hal ini di dapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana data yang digunakan data tahun 2025 Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi target Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:



1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Angka harapan hidup diantaranya:

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan
2. Memperbaiki fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu
3. Meningkatkan sistem rujukan agar pasien dapat memperoleh perawatan yang lebih baik
4. Meningkatkan imunisasi dan vaksinasi untuk mencegah penyakit menular
5. Mengoptimalkan program penanggulangan penyakit menular seperti TBC dan HIV/ AIDS
6. Kampanye kesehatan untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi
7. Pendampingan keluarga dan pasien dalam rangka memberikan dukungan asupan nutrisari dan kepatuhan Mnum OAT Pasien TBC
8. Memperluas cakupan BPJS Kesehatan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan

Upaya yang akan dilakukan :

1. Penguatan pelayanan kesehatan berbasis digital
2. Penguatan peran puskesmas dan klinik dalam deteksi dini penyakit kronis
3. Peningkatan program pencegahan penyakit
4. Peningkatan Gizi dan Kesehatan Anak
5. Edukasi dan Gaya hidup sehat



Gambar 3.2.8
Grafik Angka Harapan Hidup
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2025



Tabel 3.2.4
Peringkat Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup
Dalam Wilayah Sumatera Utara Tahun 2025

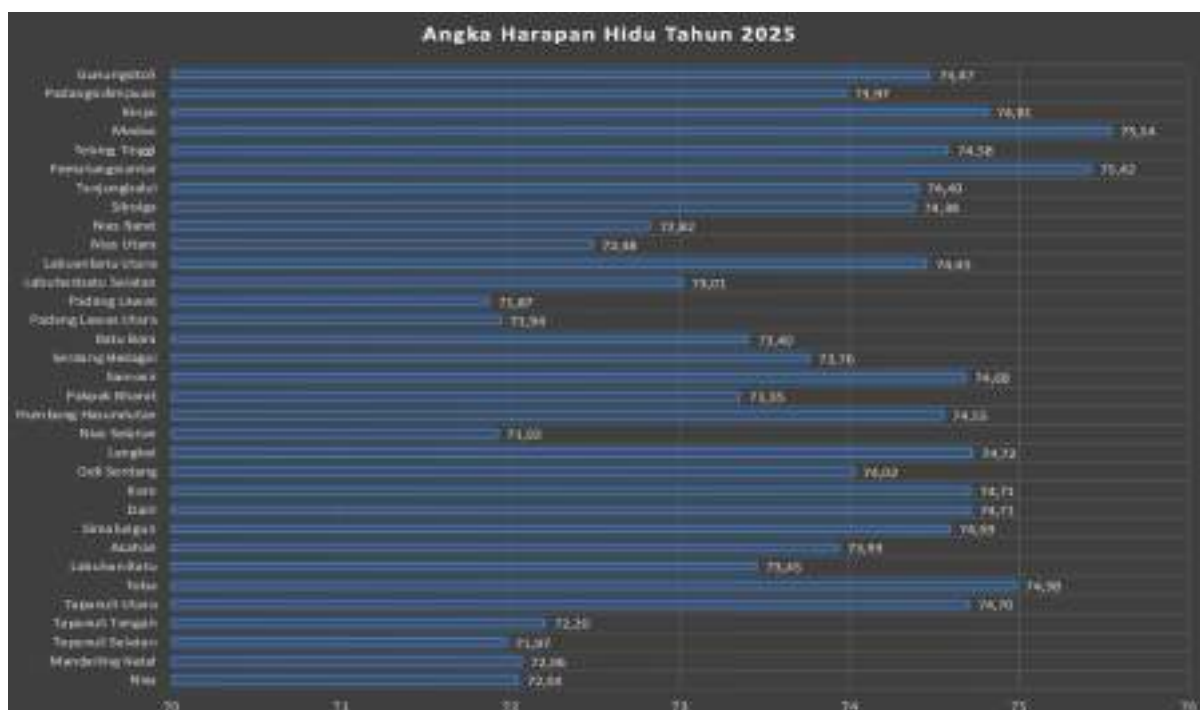
No	Kabupaten Kota	Capaian 2025
1	Nias	72,04
2	Mandailing Natal	72,06
3	Tapanuli Selatan	71,97
4	Tapanuli Tengah	72,20
5	Tapanuli Utara	74,70
6	Toba	74,98
7	Labuhan Batu	73,45
8	Asahan	73,93
9	Simalungun	74,59
10	Dairi	74,71
11	Karo	74,71
12	Deli Serdang	74,02
13	Langkat	74,72
14	Nias Selatan	71,92
15	Humbang Hasundutan	74,55
16	Pakpak Bharat	73,35



17	Samosir	74,68
18	Serdang Bedagai	73,76
19	Batu Bara	73,40
20	Padang Lawas Utara	71,94
21	Padang Lawas	71,87
22	Labuhanbatu Selatan	73,01
23	Labuhanbatu Utara	74,45
24	Nias Utara	72,48
25	Nias Barat	72,82
26	Sibolga	74,38
27	Tanjungbalai	74,40
28	Pematangsiantar	75,42
29	Tebing Tinggi	74,58
30	Medan	75,54
31	Binjai	74,81
32	Padangsidempuan	73,97
33	Gunungsitoli	74,47

Sumber data : BPS Provinsi Sumatera Utara

**Gambar 3.2.9
Grafik Angka Harapan Hidup
Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara Tahun 2025**





g. Prevalansi Stunting

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan bahwa capaian kinerja tahun 2025 belum keluar. Dalam pencapaian indikator Prevalansi Stunting Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah secara serius dalam menekan pertumbuhan indikator tersebut dengan melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Prevalansi Stunting diantaranya:

1. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
2. Pendampingan keluarga berisiko stunting termasuk remaja calon pengantin / calon PUS, ibu hamil, Pasca salin / kelahiran, baduta / balita)
3. Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting

Upaya yang akan dilakukan :

1. Pengadaan BKB Kit Stunting
2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
3. Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
4. Operasional DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting)
5. Koordinasi TPPS di tingkat Kab/Kota
6. Mini lokakarya Kecamatan



Sasaran Strategis

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Capaian Indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat” adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	30.540	27.613	90,4
2	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	40,07	44.72	111,6

h. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2024 mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Padang Lawas Utara secara signifikan. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan meningkatkan kualitas dan jumlah objek wisata dan fasilitas sarana prasarana pendukung kepariwisataan serta membentuk ekosistem kepariwisataan secara baik. Untuk memenuhi target Indikator Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Kebudayaan



Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan pemecahan rekor Muri dalam bidang Tor-Tor Naposo Nauli Bulung
2. Melaksanakan Kegiatan Pemilihan Putri Anak, Putri Remaja, dan Pemilihan Duta Budaya
3. Melaksanakan kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya
4. Pengadaan Tulisan Raksasa
5. Melaksanakan kegiatan promosi melalui media sosial
6. Pengadaan A-TV

Upaya yang akan dilakukan :

1. Melaksanakan Hibah Lembaga Adat
2. Melaksanakan Kegiatan Pemilihan Putri, Putri Remaja, dan Pemilihan Duta
3. Meningkatkan Sektor PAD Pariwisata
4. Melaksanakan Pelatihan Tari Daerah Group Sanggar Padang Lawas Utara
5. Melaksanakan Kegiatan Lomba Pidato Berbahasa Daerah
6. Pembuatan Buku Cagara Budaya
7. Pembuatan Aplikasi dan Inovasi Pariwisata

i. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2025 mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara berhasil meningkatkan Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Perikanan, ke Kabupaten Padang Lawas Utara secara signifikan. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan kehutanan. Untuk



memenuhi target Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan kehutanan Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Jumlah kunjungan wisatawan diantaranya:

1. Melakukan agenda gerakan pangan murah (GPM) dengan memfasilitasi pihak petani dan pedagang agar dapat membantu masyarakat pada tingkatan harga terutama pada komoditi strategis pangan serta sosialisasi pengolahan makanan sehat B2SA melalui sumber pangan lokal dengan memberdayakan ibu-ibu rumah tangga
2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat untuk mengusahakan keanekaragaman pangan yang bersumber dari sayuran dengan harapan dapat meningkatkan nilai konsumsi dan kesehatan pangan dengan sumber sayuran
3. Melakukan pendataan dan penerbitan STDB pekebun Sawit sebanyak 1000 persil
4. Melaksanakan peningkatan Indeks pertanaman padi dengan mensuplay bantuan Alat dan Mesin Pertanian serta Bibit Benih
5. Menekan inflasi dengan memberikan bantuan untuk budidaya komoditas bawang merah dan cabe merah
6. Berkoordinasi dengan instansi provinsi dan pusat dalam memberhasilkan target



indikator secara berkala

7. Mengoptimalkan kerja PPL Lapangan untuk pendampingan petani

Upaya yang akan dilakukan :

1. Menyediakan stok bahan pangan berupa beras dengan melakukan MOU pada pihak BULOG agar ketersediaan beras di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat membantu hal kondisi darurat bencana alam, konflik sosial atau lainnya
2. Memastikan target peremajaan sawit rakyat yaitu 500 hektar dan melakukan monitoring dan evaluasi perkebunan sawit rakyat
3. Mengadvokasi pekebun sawit untuk mendaftarkan lahannya (STDB)
4. Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk budidaya bawang merah dan cabe merah

Sasaran Strategis
Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Capaian Indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Infrastruktur Dasar” adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	74	54,96	76,9
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses AIR Minum Layak	100	83,79	83,7



j. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan bahwa capaian tahun 2025 mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak berhasil meningkatkan Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap. Kegagalan pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya yang harus lebih maksimal untuk terus menerus dalam perbaikan meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk memenuhi target Indikator Pesentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pogram Penyelenggaraan Jalan

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap diantaranya:

1. Pemeliharaan rutin dan berkala dengan melakuakn perawatan jalan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang lebih parah;
2. Peningkatan rehabilitasi jalan yang mengalami kerusakan struktural agar kembali memenuhi standar jalan mantap;
3. Menambah jaringan jalan di daerah yang membutuhkan untuk mendukung konektivitas;
4. Menggunakan standar mutu dalam pembangunan dan perbaikan jalan agar lebih tahan lama.

Upaya yang akan dilakukan :

1. Melakukan Pemeliharaan Berkala seperti overlay (lapisan ulang aspal) dan perkerasan ulang jalan untuk mempertahankan kualitas jalan dalam kondisi mantap.;
2. **Rekonstruksi jalan** jika kondisi jalan sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki hanya dengan pemeliharaan berkala dan melakukan



rehabilitasi jalan untuk jalan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat;

3. Mengoptimalkan sistem manajemen jalan berbasis data untuk menentukan prioritas pemeliharaan dan pembangunan.
4. Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi jalan untuk memastikan langkah perbaikan yang tepat.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan melalui aplikasi atau sistem pengaduan.
6. Membangun dan memperbaiki saluran drainase untuk mencegah genangan air yang dapat mempercepat kerusakan jalan.

k. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan bahwa capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tidak memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam tahun 2025. Kegagalan pencapaian target indikator tersebut memberikan informasi harus adanya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk memenuhi target Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak diantaranya:

1. Membangun dan memperluas jaringan perpipaan air bersih oleh PDAM dan penyedia layanan air minum lainnya.
2. Subsidi atau bantuan pemasangan sambungan air rumah tangga bagi keluarga



berpenghasilan rendah.

3. Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendorong penyediaan air minum layak untuk semua.

Upaya yang akan dilakukan :

1. Pembangunan sumur bor, instalasi pengolahan air, dan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah yang sulit dijangkau jaringan perpipaan.
2. Pelindungan sumber mata air dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan.
3. Pembangunan sarana air minum komunitas di kecamatan
4. Penguatan pengawasan kualitas air dan pelayanan penyedia air minum.

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup ” adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Air	72	70	97,2

I. Indeks Kualitas Air

Capaian indeks kualitas Air tahun 2025 mengalami peningkatan. Pencapaian tersebut juga memberikan informasi adanya upaya pemerintah daerah secara terus menerus dalam perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencakup indeks kualitas Air, indeks Kualitas Udara, kualitas tutupan hujan dan kualitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk memenuhi target Indikator Indeks



Kualitas Air Kabupaten Padang Lawas Utara telah melakukan Program/kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi target indikator Indeks Kualitas Air diantaranya:

1. Pengawasan terhadap penambangan galian C agar tidak merusak daerah aliran sungai.
2. Mengadakan penanaman bibit di sekitar sungai
3. Mengadakan pengawasan terhadap usaha/atau kegiatan masyarakat biar jangan membuang sampah ke sungai

Upaya yang akan dilakukan :

1. Desain kampanye pengambilan data sampel harus seimbang antara persyaratan data dan biaya yang diperlukan
2. Menggunakan profesional yang berpengalaman
3. Menggunakan desain pelaksana dan analisis pengambilan sampel
4. Sosialisasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup





3.3 Realisasi Anggaran

KODE	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA	
				ANGGARAN/PERSENTASE	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	-100%
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.702.134.343	15.933.164.851	768.969.492	95,62
4.01.01.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.555.000	197.227.000	69.328.000	73,99
4.01.01.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.755.000	33.240.000	515.000	98,47
4.01.01.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	232.800.000	163.987.000	68.813.000	70,44
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	684.342.242	592.924.910	91.417.332	86,64
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	494.922.242	403.694.910	91.227.332	81,57
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	189.420.000	189.230.000	190.000	99,90



4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.374.345.800	4.168.231.521	206.114.279	95,29
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	392.873.700	392.173.000	700.700	99,82
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	687.545.700	685.878.900	1.666.800	99,76
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.892.500	33.930.500	19.962.000	62,96
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	508.576.400	508.043.000	533.400	99,90
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	839.514.000	668.089.591	171.424.409	79,58
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.832.128.400	2.575.342.026	256.786.374	90,93
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.668.128.400	2.411.342.026	256.786.374	90,38
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	285.801.200	280.169.000	5.632.200	98,03
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	94.811.000	90.441.000	4.370.000	95,39
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	190.990.200	189.728.000	1.262.200	99,34



4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.625.425.800	1.579.154.730	46.271.070	97,15
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	274.020.000	271.602.701	2.417.299	99,12
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.271.405.800	1.227.552.029	43.853.771	96,55
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	80.000.000	-	100
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	771.979.700	767.237.554	4.742.146	99,39
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	159.701.900	158.382.154	1.319.746	99,17
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	199.545.500	198.543.000	1.002.500	99,50
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	146.102.300	145.115.600	986.700	99,32
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.725.400	9.725.400	-	100



4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	256.904.600	255.471.400	1.433.200	99,44
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.304.287.801	2.286.198.000	18.089.801	99,21
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	609.287.801	603.498.000	5.789.801	99,05
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.695.000.000	1.682.700.000	12.300.000	99,27
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.440.912.300	3.372.151.810	68.760.490	98,00
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.000.000	55.000.000	-	100
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	707.674.800	692.361.914	15.312.886	97,84
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.733.600	371.524.396	209.204	99,94
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.306.503.900	2.253.265.500	53.238.400	97,69
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.903.800	88.076.000	1.827.800	97,97
4.01.01.2.01.0001	penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.437.500	23.110.000	327.500	98,60



4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	17.625.300	17.290.000	362.300	98,10
05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.035.680.400	1.025.112.300	10.268.100	98,98
5.01.02.2.02	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	62.117.700	61.165.700	952.000	98,47
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	62.117.700	61.165.700	952.000	98,47
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	309.810.300	308.079.400	1.730.900	99,44
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	309.810.300	308.079.400	1.730.900	99,44
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	663.752.400	6655.867.200	7.885.200	1002,76
5.01.02.2.01.0001	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	-	-	-
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	137.127.800	135.927.800	1.200.000	99,12
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	114.625.400	112.121.250	2.504.150	97,82



5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	411.999.200	407.818.150	4.181.050	-
05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	518.601.100	527.978.450	(9.377.350)	101,81
5.05.02.2.01	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	518.601.100	527.978.450	(9.377.350)	101,81
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	-	-	-	-
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	518.601.100	527.978.450	(9.377.350)	101,81
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	-	-	-	-
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	-
06:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.097.383.000	1.050/186.741	47.196.259	-
6.01.02.2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	424.340.100	417.44.237	6.895.863	-
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.624.100	8.958.500	3.665.600	70,96



6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	411.716.000	408.485.737	3.230.263	99,22
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	673.042.900	632.742.504	40.300.396	94,01
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	59.068.500	58.759.440	309.060	99,48
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160.140.300	159.106.150	1.034.150	99,35
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	88.369.100	60.541.182	27.827.918	68,51
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	65.391.900	63.115.624	2.276.276	96,52
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	124.881.900	124.528.200	353.700	99,72
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	40.407.700	39.207.508	1.200.192	97,03
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	134.783.500	127.484.400	7.299.100	94,58
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	361.219.312.531	67.698.979.859	293.520.332.672	18,74
5.02.02.2.05	" Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah "	220.747.300	235.475.100	(14.727.800)	106,67



5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	96.210.900	111.303.700	(15.092.800)	115,69
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	124.536.400	124.171.400	365.000	99,71
5.02.02.2.01	"Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah"	1.242.921.900	887.936.000	354.985.900	71,44
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	64.624.000	63.808.000	816.000	98,74
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65.274.000	63.727.500	1.546.500	97,63
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	723.434.000	707.426.500	16.007.500	97,79
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	313.574.000	322.535.500	(8.961.500)	102,86
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	41.158.000	34.882.500	6.275.500	84,75
5.02.02.2.03	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	645.332.500	797.286.800	(151.954.300)	123,55



5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	54.198.200	66.532.200	(12.334.000)	122,76
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	25.831.600	43.116.600	(17.285.000)	166,91
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	332.050.500	317.509.000	14.541.500	95,62
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	186.106.300	245.902.200	(59.795.900)	132,13
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	28.689.800	86.539.400	(57.849.600)	301,64
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	9.735.300	28.966.600	(19.231.300)	297,54
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	8.720.800	8.720.800	-	100



5.02.02.2.02	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7.956.672.766	646.384.591	7.310.288.175	8,12
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	178.982.800	173.482.940	5.499.860	96,93
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6.260.000	6.240.000	20.000	99,68
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	7.558.122.966	235.706.475	7.322.416.491	3,12
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	66.039.800	45.093.800	20.946.000	68,28
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.014.000	7.000.000	14.000	99,80
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	79.196.000	124.882.776	(45.686.776)	157,69
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran	11.627.200	8.884.800	2.742.400	76,41



	Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49.430.000	45.093.800	4.336.200	91,23
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	351.153.638.065	65.131.897.368	286.021.740.697	18,55
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	343.117.697.400	57.024.274.150	286.093.423.250	16,62
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000	2.910.540.000	89.460.000	97,02
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.035.940.665	5.197.083.218	(161.142.553)	103,20
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	721.072.900	782.613.360	(61.540.460)	108,53
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	721.072.900	782.613.360	(61.540.460)	108,53
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	59.616.000	59.616.000	-	100
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	13.494.000	13.454.000	40.000	99,70
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.995.500	25.315.500	4.680.000	84,40



5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	262.151.200	370.038.760	(107.887.560)	141,15
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	207.320.200	197.532.600	9.787.600	95,28
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25.068.000	19.578.000	5.490.000	78,10
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14.988.000	14.908.000	80.000	99,47
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82.544.000	70.746.500	11.797.500	85,71
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.811.781.100	1.888.944.394	(77.163.294)	104,26
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.811.781.100	1.888.944.394	(77.163.294)	104,26
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	346.500.200	416.289.400	(69.789.200)	120,14
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	74.375.000	25.880.000	48.495.000	34,80
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	-	-
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta	826.543.700	963.617.194	(137.073.494)	116,58



	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	124.618.000	137.007.600	(12.389.600)	109,94
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	400.568.000	306.974.000	93.594.000	76,63
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.176.200	39.176.200	-	100
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	193.175.945	186.282.251	6.893.694	96,43
2.16.01.2.01	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	193.175.945	186.282.251	6.893.694	96,43
2.16.01.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	115.230.145	111.357.600	3.872.545	96,64
2.16.01.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	20.305.800	20.240.800	65.000	99,68
2.16.01.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	40.000.000	40.000.000	-	100
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	233.455.800	202.071.750	31.384.050	86,56



2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	229.879.800	198.495.750	31.384.050	86,35
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	229.879.800	198.495.750	31.384.050	86,35
2.12.02.2.04	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.576.000	3.576.000	-	100
2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	3.576.000	3.576.000	-	100
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	30.169.300	29.994.600	174.700	99,42
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	30.169.300	29.994.600	174.700	99,42
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	30.169.300	29.994.600	174.700	99,42
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	119.001.000	80.366.000	38.635.000	67,53
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	119.001.000	80.366.000	38.635.000	67,53
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan ,analisis,evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	807.000	795.000	12.000	98,51



2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.151.000	2.123.000	28.000	98,70
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	91.044.200	77.448.000	13.596.200	85,07
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.998.800	24.998.800	-	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.182.797.090	42.992.780.698	2.190.016.392	95,15
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.274.700	251.515.415	28.759.285	89,74
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	-	-	-
1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.727.900	19.727.900	-	100
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	260.546.800	231.787.515	28.759.285	88,96



1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.040.535.562	8.111.233.579	929.301.983	89,72
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	2.835.327.950	1.919.439.000	915.888.950	67,70
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.247.000	150.210.000	37.000	99,98
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.771.276.428	34.544.429.904	1.226.846.524	96,57
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.136.256.800	3.115.806.450	20.450.350	99,35
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	336.199.200	317.279.000	18.920.200	94,37
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	250.395.400	150.961.750	99.433.650	60,29
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	534.800.000	534.692.000	108.000	99,98



1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	309.398.200	309.267.945	130.255	99,96
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	604.600.000	603.196.500	1.403.500	99,77
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000	39.872.500	127.500	99,68
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	49.872.500	127.500	99,75
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	638.586.100	633.905.915	4.680.185	99,27
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	80.040.000	78.875.085	1.164.915	98,54
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.564.102.300	5.472.740.910	91.361.390	98,36
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.159.367.800	1.141.842.000	17.525.800	98,49
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	327.865.400	324.259.565	3.605.835	98,90
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	99.682.900	97.403.400	2.279.500	97,71
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	787.047.800	612.948.390	174.099.410	77,88



1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	348.019.000	346.564.740	1.454.260	99,58
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	63.861.600	63.544.870	316.730	99,50
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.634.094.130	2.624.194.130	9.900.000	99,62
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.982.527.498	12.563.253.807	419.273.691	96,77
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.931.338.900	4.581.125.617	350.213.283	92,90
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	169.344.000	168.916.750	427.250	99,75
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	90.710.400	85.601.800	5.108.600	94,37
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	90.710.400	85.601.800	5.108.600	94,37



1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	77.464.424.241	77.363.952.707	100.471.534	99,87
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	6.751.944.800	6.704.297.130	47.647.670	99,29
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100.000.000	100.000.000	-	100
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	16.836.000	16.521.240	314.760	98,13
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	98.600.000	98.600.000	-	100
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	30.000.000	-	30.000.000	-
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	351.764.000	351.764.000	-	100
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	644.079.600	644.079.600	-	100
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	596.990.400	596.990.400	-	100
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.006.480.000	3.006.480.000	-	100
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	138.214.600	121.084.600	17.130.000	87,61



1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	189.352.200	189.352.200	-	100
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	502.586.800	502.586.800	-	100
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	457.572.000	457.572.000	-	100
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	-
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	-
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	630.000.000	630.000.000	-	100
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	769.550.000	733.321.500	36.228.500	95,29
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	150.000.000	150.000.000	-	100
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	351.764.000	351.764.000	-	100
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	235.370.800	235.370.800	-	100
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	199.682.300	198.244.760	1.437.540	99,28



1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	530.375.400	530.375.400	-	100
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.932.420.040	31.932.420.040	-	100
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	629.056.400	629.056.400	-	100
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	749.560.800	749.560.800	-	100
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	116.491.600	116.491.600	-	100
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	639.103.600	639.103.600	-	100
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	457.572.000	457.572.000	-	100
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	500.000.000	500.000.000	-	100
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	600.000.000	-	100
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	256.042.700	256.042.700	-	100
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.067.185.000	1.067.185.000	-	100



1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	502.586.800	502.586.800	-	100
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.725.760.984	13.689.341.349	36.419.635	99,73
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	630.000.000	630.000.000	-	100
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000	250.000.000	-	100
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	8.164.624.559	8.030.868.870	133.755.689	98,36
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	375.600.000	375.600.000	-	100
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	750.847.941	750.847.941	-	100
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.235.200	58.235.200	-	100
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	655.815.900	655.815.900	-	100
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.364.745.600	5.364.745.600	-	100



1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	110.900.600	110.900.600	-	100
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	922.687.000	922.687.000	-	100
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	790.750.743	790.750.743	-	100
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	-	-	-	-
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	-	-	-	-
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.616.800.000	2.707.980.000	1.908.820.000	58,65



2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.194.000.000	714.900.000	479.100.000	59,87
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.432.800.000	857.880.000	574.920.000	59,87
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	1.990.000.000	1.135.200.000	854.800.000	57,05
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	96.000.000	76.800.000	19.200.000	80,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	-	130.000.000	-
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	123.200.000	122.790.776	409.224	99,67
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	123.200.000	122.790.776	409.224	99,67



3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	123.200.000	122.790.776	409.224	99,67
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	708.646.500	959.941.241	(251.476.741)	135,46
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	462.867.100	462.867.100	-	100
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	291.200.000	291.200.000	-	100
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	245.597.400	497.074.141	(251.476.741)	202,39
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	245.597.400	245.377.140	220.260	99,91
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	300.040.400	219.466.900	80.573.500	73,15
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	300.040.400	219.466.900	80.573.500	73,15
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	80.040.400	-	-	-



3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	220.000.000	219.466.900	533.100	99,76
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.310.393.455	1.178.812.800	131.580.655	89,96
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-	-	-	-
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.310.393.455	1.178.812.800	131.580.655	89,96
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	375.459.900	255.087.800	120.372.100	67,94
03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	96.984.900	95.422.862	1.562.038	98,39
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	-	-	-	-



2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	348.890.100	317.272.511	31.616.589	90,94
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	136.229.900	126.180.340	10.049.560	92,62
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	126.000.000	115.994.230	10.005.770	92,06
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	10.229.900	10.186.110	43.790	99,57
2.09.03.2.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	52.000.000	51.573.160	426.840	99,18
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	52.000.000	51.573.160	426.840	99,18
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.09.03.2.01	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	160.660.200	139.520.011	21.140.189	86,84
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	11.800.000	11.732.400	67.600	99,43



2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	-	-
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.032.200.000	1.030.327.694	1.872.306	99,82
1.03.03.2.01	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	1.032.200.000	1.030.327.694	1.872.306	99,82
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	-	-	-	-
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	175.000.000	174.815.000	185.000	99,89
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	857.200.000	855.512.694	1.687.306	99,80
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	-	-	-
03.01.2010	Program Penyelenggaraan Jalan	4.637.500.000	4.592.237.290	45.262.710	99,02
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.637.500.000	4.592.237.290	45.262.710	99,02
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	187.500.000	186.574.000	926.000	99,51



1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	-	-	-	-
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	-	-	-	-
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	450.000.000	446.500.000	3.500.000	99,22
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	-	-	-	-
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	550.000.000	548.612.760	1.387.240	99,75
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	3.250.000.000	3.211.613.000	38.387.000	98,82
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.960.439.000	1.950.234.875	10.204.125	99,48
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.960.439.000	1.950.234.875	10.204.125	99,48
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.960.439.000	1.950.234.875	10.204.125	99,48



BAB IV PENUTUP

Sebagai Pemerintahan yang relatif baru dan terus ingin memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah bekerja seoptimal mungkin memperbaiki kualitas capaian kinerja meskipun masih terdapat beberapa capaian kinerja utama yang tidak sesuai target namun tetap dalam jalur pertumbuhan yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini memberikan gambaran tentang berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari capaian strategis yang ditunjukkan melalui pada Tahun Anggaran 2025. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan Akuntabilitas Kinerja seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Padang Lawas Utara. Di masa mendatang Kabupaten Padang Lawas Utara akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan Kinerja yang kita ingin wujudkan bersama.

Secara umum, dari 5 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja utama diantaranya:



Tabel 4.1
Ikhtisar Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Padang Lawas
Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima	Nilai AKIP	62,18 (B)	100,2	E-SAKIP Reviu Kemenpan RB
		Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Belum Keluar	Belum Keluar	BPK RI Perwakilan Sumatera Utara
		Indeks Pelayanan Publik	3,64 (B)	86,6	Kemenpan RB Nomor 795 Tahun 2023
2	Meningkatnya Kualitas SDM yang berdaya saing	Angka harapan lama sekolah	13,73	100,9	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Rata-Rata lama sekolah	10,05	104	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Angka harapan hidup	71,94	105,9	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Prevalansi Stunting	Belum Keluar	Belum keluar	
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kunjungan wisatawan	27.613	90,4	Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara
		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	44,72	11,6	
4	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	54,96	76,9	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	83,79	83,7	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	70	97,2	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sasaran Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 tingkat persentasenya 85,74% dengan interpretasi



memuaskan dan telah memenuhi sasaran yang telah ditargetkan. Berdasarkan skala ordinal, maka capaian kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dikategorikan berhasil.

Keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari hal-hal penunjang/faktor pendorong, penghambat/kendala, namun demikian beberapa kendala yang muncul telah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi pemecahannya sehingga di dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dipengaruhi oleh komitmen penyelenggara pemerintahan yang baik didukung perencanaan kinerja yang mulai terarah serta dukungan segenap aparatur yang telah bekerja sesuai target kinerja masing masing disertai dukungan masyarakat maupun pihak swasta. Oleh karena itu, seluruh unsur *Stakeholder* perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat di atasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Perlu secara terus menerus memiliki arah kinerja yang jelas dan tertuang dalam rencana kinerja dan rencana kerja anggaran yang memprioritaskan capaian kinerja
2. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer dan perlengkapannya
3. Penambahan dan peningkatan profesionalisme pegawai yang mempunyai



pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya

4. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Penyusunan program kerja berdasarkan prioritas yang dapat langsung di rasakan oleh masyarakat
6. Pembenahan Indikator Kinerja Sasaran yang berorientasi kepada hasil yang akan di capai serta dapat di ukur berdasarkan datarumus formulasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun 2025. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik yang membangun dan saran untuk perbaikannya dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ke depannya akan menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025.

Demikianlah Laporan Kinerja ini disusun, kiranya dapat membantu dalam memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2025 serta dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dimasa yang akan datang. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Laporan Kinerja pada tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi.